



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/3/2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPRD harus melakukan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan memperhatikan Capaian Kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022 perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 13 Maret 2022 Nomor 170/731/401.040/2023 perihal Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
 2. Surat Wali kota Madiun tanggal 16 Maret 2023 Nomor 130/1506/401.011/2023 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022;
 3. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 17 Maret 2022 Nomor 170/558/401.040/2022 perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2021;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022;
 5. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 004/F.PDIP/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
 6. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 003/F.Demokrat/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;

7. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 003/F.Perindo/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
8. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 12/F.Gerindra/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
9. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 03/FPKB-03/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 005/F.PKS-PAN/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
11. Surat Ketua Fraksi PSI-Nasdem DPRD Kota Madiun tanggal 24 Maret 2023 Nomor 03/F.PSI-Nasdem/III/2023 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan LKPJ Wali kota Madiun Tahun 2022;
12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2022 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah
1. melaksanakan Pendampingan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022 dengan Tenaga Ahli;
 2. melaksanakan Studi Banding Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022;
 3. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022 dengan Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Madiun; dan
 4. menyusun Rekomendasi DPRD Kota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Madiun Tahun 2022.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan 24 April 2023 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 24 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.



Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/3/2023
TANGGAL : 24 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA MADIUN TAHUN 2022**

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Anggota : DWI JATMIKO AGUNG S, S.H., S.E., M.M.
4. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
5. Anggota : Drs. SUGENG, S.H., M.H.
6. Anggota : SUDJARWO, S.T.
7. Anggota : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi., M.Pd.
8. Anggota : HARI SANTOSO, S.T.
9. Anggota : HANDOKO BUDI SETYO, S.H.
10. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si., Apt., M.M.
11. Anggota : Drs. SUBYANTARA
12. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
13. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**



Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.